

**UPAH PETUGAS PANTAI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**ALDI DWI PRANATA  
NPM :1721030104**



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

# **UPAH PETUGAS PANTAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum  
Ekonomi Syariah

**Oleh**

**ALDI DWI PARANATA  
NPM 1721030104**

**Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi)**

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Pantai sebagai salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional harus memiliki daya tarik khas dan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan daerah, Setiap pengunjung tentunya butuh mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berwisata, maka dibutuhkan adanya petugas pantai. Petugas pantai memiliki peranan penting dalam menjamin keselamatan wisatawan, petugas pantai bertugas melakukan upaya preventif melalui pemasangan rambu dan himbauan melalui pengeras suara, pertolongan pertama, dan koordinasi dengan pihak medis. Petugas pantai selain memiliki tanggung jawab (tugas), juga memiliki hak berupa upah kerja. Pada saat ini keberadaan petugas pantai di Kabupaten Pesisir Barat telah dibentuk sejak tahun 2016 dan sudah dilakukan pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang, namun pada saat ini hanya 6 orang yang aktif dan tersebar di tiga tempat daerah wisata pantai di kabupaten setempat.

Adapun masalah dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana upah petugas pantai yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang upah petugas pantai yang dimaksud. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upah Petugas Pantai dan dalam Perspektif Hukum Islam oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada upah petugas pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor: B/68/KPTS/IV.10/HK-PSB/2020 Tentang petugas pelaksana pada tempat-tempat wisata milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam surat bupati tersebut, petugas pantai diberi upah Rp 500.000 per hari-hari besar saja, dengan tugas dan tanggung jawab yang relatif berat, dan petugas pantai juga mendapat tugas tambahan yaitu tetap bekerja di hari-hari libur seperti di hari sabtu dan minggu tanpa ada tunjangan dari pihak Dinas Pariwisata atas pekerjaan tambahan yang diberikan. Dalam perspektif Hukum Islam upah petugas pantai di Pesisir Barat oleh Dinas Pariwisata tidak sesuai dengan apa yang petugas pantai kerjakan, besaran upah tersebut belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab petugas pantai yang relatif berat dan juga tidak ada tunjangan atas pekerjaan tambahan yang Dinas Pariwisata berikan kepada petugas pantai, selain penerimaan upahnya juga tidak seketika diberikan, tetapi menunggu beberapa hari kemudian bahkan sampai 1 minggu.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Upah Petugas Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Pada Dinas  
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)  
Nama : Aldi Dwi Pranata  
NPM : 1721030104  
Jurusan : Muamalah ( Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Drs. H. Chaidir Nasution M.H**  
**NIP. 195802011986031002**

  
**Fathul Mu'in., S.H.I, M.H.I**  
**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Upah Petugas Pantai Dalam Perpsektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)"** disusun oleh **Aldi Dwi Pranata, NPM : 1721030104**, Program Studi : **Mumalah (Hukum Ekonomi)**. Telah di ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis/ 24 Juni 2021** Waktu : **09.00- 11.00 WIB**, Tempat: **Ruang Sidang II Fakultas Syaria'ah**

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Drs. H. Irwantoni, M. Hum** 

**Sekretaris** : **Muslim., S.H.I., M.H.I** 

**Penguji Utama** : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag** 

**Penguji Pendamping I** : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H** 

**Penguji Pendamping II** : **Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I** 

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya : *Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.* (H.R Ibnu Majah).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al- Baihaqi, *Sunan Kubrah*, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bapak Ali Rahman dan Ibu Yuli Astri Diah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Bu gede Nuning Retno Hasasih yang senantiasa membimbing, memotivasi dan mendo'akan demi selesainya skripsiku
3. Kakakku Angga Wahyutullah dan Adikku Albari'ul Febry, yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.



## RIWAYAT HIDUP

Aldi Dwi Pranata lahir di Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 23 desember 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Ali Rahman dan Ibu Yuli Astri Diah

Riwayat pendidikannya Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Penengahan pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Krui pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Krui pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung,  
Penulis,

**Aldi Dwi Pranata**  
**NPM. 1721030104**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur *alhamdulillah rabbil'alamin* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upah Petugas Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua program studi Muamalah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.S.I dan sekretaris jurusan Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Drs. Chaidir Nasution, M.H, dan pembimbing II bapak Fathul mu'in, M.H.I, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan petugas pantai yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain.
8. Terima kasih Untuk seseorang yang selalu mensupport dan berjuang bersama demi selesainya skripsiku
9. Sepupuku Novi Yanti dan Muhammad Zulkarnain yang selalu membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Agung Rohman, Angga Tri jaya, Pier El Sanda yang selalu memberi semangat demi selesainya skripsiku
11. Kawan seperjuang Rian Rizomi, Ilham Hadi, Irpan Kurniawan, Samsul Arifin, Rio Lavenda, Reza Ependi, Rian Hidayat, Yoandra Ibrahim, Muhammad Ramadani, Rediko Satriawan yang telah membantuku untuk menyelesaikan skripsiku
12. Yang kubanggakan almameter tercinta UIN Radenn Intan Lampung
13. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Karya Penggawa (PERMA KARWA) yang telah membimbingku dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
14. Keluarga besar Ikatan Muli Mekhanai Penengahan La'ay (IMMPL) yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Keluarga besar Kom 20 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
16. Keluarga besar Muamalah D yang selalu memberikan motivasi dan bertukar pikiran demi menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan Kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung,  
Penulis

**Aldi Dwi Pranata**  
**NPM. 1721030104**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SUARAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### BAB II KAJIAN TEORI

#### Deskripsi Umum Tentang Upah Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	17
2. Rukun dan Syaratnya .....	23
3. Macam dan Bentuknya .....	26
4. Dasar-dasar Pertimbangan Dalam Penetapannya .....	30
5. Pembayaran dan Berakhirnya .....	36

### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	
1. Sejarah berdirinya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	41
2. Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	44



3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	46
4. Kondisi Pantai.....	47
B. Upah Petugas Pantai Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	
1. Dasar Hukum Upah Petugas Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	58
2. Praktik Upah Petugas Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	59
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Petugas Pantai.....	63

#### **BAB IV ANALISA DATA**

1. Upah Petugas Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	65
2. Analisis Hukum Islam Tentang Upah Petugas Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	67

#### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	69
2. Rekomendasi.....	69

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....46



## DAFTAR TABEL

1. Table 1 Data Wisatawan Manca Negara Dan Domestic Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 ..... 56
2. Table 2 Data Wisatawan Manca Negara Dan Domestic Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 – 2018 ..... 56





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan judul**

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, akan lebih baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami dari makna yang ditulis oleh penulis. Adapun judul skripsi yang penulis akan buat yaitu Penentuan Upah Petugas Penjaga Pantai Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu penjelasan istilah sebagai berikut :

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
2. Petugas/Penjaga pantai adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengawasi dan menyelamatkan para pengunjung yang mengalami musibah di pantai.<sup>2</sup>
3. Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu, pertama pengertian perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya.) Kedua, perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muharam Hidayat, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 49.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 934.

<sup>3</sup>*Ibid* 850.

4. Hukum menurut *ushul fiqh* berarti kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang).<sup>4</sup>Oleh karena itu Hukum Islam (syara') merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syaria'at atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rosul, baik dalam bentuk testual maupun hasil pemahaman ulama, karenanya juga dikatakan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian tersebut adalah bagaimana hukum Islam memandang tentang penetapan dan besaran upah bagi petugas pantai di Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam muamalah, suatu perjanjian dikenal dengan istilah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Akad sangat berhubungan erat dengan suatu jasa, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal pengupahan. Adanya pihak pertama sebagai penyedia jasa dan adanya pihak kedua sebagai pelaku jasa dalam hal ini, perjanjian (Akad) dalam hal jasa pengupahan.<sup>6</sup>

Pantai sebagai salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional jika memiliki daya tarik khas dan dapat menjadi salah satu sumber

---

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 29.

<sup>5</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 5.

<sup>6</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

penghasilan daerah, Setiap pengunjung tentunya mendapatkan rasa aman dan kenyamanan saat berwisata maka dibutuhkan adanya petugas pantai. Petugas pantai selain memiliki tanggung jawab (tugas), juga memiliki hak berupa upah kerja.

Pada saat ini keberadaan petugas pantai di kabupaten pesisir barat telah di bentuk sejak tahun 2016 dan sudah dilakukan pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang, namun pada saat ini hanya 6 orang yang aktif dan tersebar di tiga tempat daerah wisata pantai di kabupaten setempat. Kepala dinas pariwisata pesisir barat menjelaskan status petugas penjaga pantai di kabupaten pesisir barat hanya tinggal 6 orang tersebut dikarenakan pada anggaran tahun 2017 – 2018 belum bisa dianggarkan buat honor bagi 20 lifeguard, sehingga baru dapat dianggarkan untuk 6 orang saja . Ke 6 orang itu disebar di tiga tempat daerah wisata, yaitu 2 orang di pantai labuhan jukung kecamatan pesisir tengah, 2 Orang di pantai mandiri sejati kecamatan krui selatan, dan 2 orang di pantai tanjung setia kecamatan pesisir selatan. Pada saat ini upah petugas pantai belum dapat dipastikan berapa jumlahnya sebab belum ada kepastian dalam pembayaran petugas pantai tersebut.<sup>7</sup>

Untuk diketahui, petugas pantai memiliki peranan penting dalam menjamin keselamatan wisata. Petugas pantai bertugas melakukan upaya preventif melalui pemasangan rambu dan himbauan pengeras suara, pertolongan pertama, dan koordinasi dengan pihak medis. Namun para petugas pantai dari badan penyelamat wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, mereka muncul hanya pada hari besar dan kegiatan yang diadakan Dinas Pariwisata.

Oleh karena itu permasalahannya tidak saja ditudingkan begitu saja kepada penyelenggara pekerjaan, akan tetapi para pekerja terkadang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya secara baik serta tidak memahami

---

<sup>7</sup>Keberadaan Petugas Penjaga Pantai Kabupaten Pesisir Barat (Online), Tersedia di: [www.lampost.com](http://www.lampost.com)(18 Oktober 2020 Pukul 19.45 WIB).



ketentuan-ketentuan perusahaan atau pemerintah yang mengatur hak dan tanggung jawab pekerja.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait **Upah Petugas Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).**

#### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karna itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Upah Petugas Pantai Menurut Perspektif Hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upah Petugas Pantai yang Diberikan oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Upah Petugas Pantai tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Upah Petugas Pantai yang diberikan oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Upah Petugas Pantai oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah upah petugas penjaga pantai. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan kajian terdahulu ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu :

skripsi Muyazidil Khoiri (2001), yang berjudul “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Perpektif Hukum Islam”. Yang kesimpulannya penetapan upah sudah menjadi adat setempat, adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga di pasar dan perhitungannya didasarkan pada banyaknya waktu buruh bekerja.<sup>8</sup>

Selain dari beberapa skripsi diatas, penulis juga menuangkan jurnal yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis antara lain yaitu:

Pertama, Jurnal Sri Dewi Yusuf, Yang Berjudul “Konsep Penentuan Upah Dalam Islam” Vol 10 No 2, (Desember 2010), 309-324. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Islam sangat jelas melindungi hak-hak para majikan dan para pekerja. Untuk melindungi hak-hak pekerja agar upah tidak jatuh dibawah tingkat terendah dan naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi untuk menyelamatkan kepentingan majikan. Oleh karena itu upah sesungguhnya akan berubah antara kedua batas-batas ini yang didasarkan pada undangundang persediaan dan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja yang dipengaruhi oleh keefektifan kekuatan organisasi. Apabila upah

---

<sup>8</sup> Muyazidil Khoiri, *Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Kedungsari Bandongan Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kali Jaga, 2001.

bergerak mempengaruhi standar kehidupan sehari-hari para pekerja dalam kondisi organisasi lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah pada hari pembalasan itu meragukan. Dan apabila kondisi organisasi para pekerja sangat kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah akan bergerak mengarah pada batas tertinggi sesuai sumbangsih para pekerja dalam proses produksi.<sup>9</sup>

Jika pada suatu waktu upah akan jatuh dibawah tingkat minimum maka negara mempunyai hak yang sah untuk intervensi dalam menentukan upah yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Kebijakan penetapan standar upah yang layak bagi pekerja, adalah dibolehkan dengan alasan yang mendasar yakni untuk menegakan keadilan, yang mengandung makna terwujudnya keseimbangan hubungan antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh. Dalam Islam ada lembaga yang bernama wilayah al-hisbah dimana menurut Ibnu Taimiyah, lembaga ini berfungsi sebagai dewan pertimbangan dan pengawasan, termasuk diantaranya adalah pemberian upah kepada pekerja. Hal ini memberikan kebenaran ajaran Islam kepada manusia untuk memperkuat keimanan kepada Allah dan percaya adanya hari pembalasan didalam menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan apabila para majikan menyadari sepenuhnya kewajibanya dalam membayar para pekerja dengan upah yang cukup menutupi kebutuhan pokok. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi : *"perlakukanlah saudaramu sesama muslim seperti apa yang kamu perlakukan terhadap dirimu sendiri"* sehingga kamu beriman dan mengharap ridha Allah dalam pengabdian kepada manusia.

Kedua, Jurnal siswadi, Yang Berjudul "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan

---

<sup>9</sup>Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah Dalam Islam, *Jurnal*, Vol 10 N0 2, (Desember 2010), 309-324.



Ekonomi Umat Dan Berkeadilan” Vol IV No 2, (Agustus 2014), 105.<sup>10</sup> Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah. Untuk itu, upah yang dibayarkan masing-masing bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Ketiga, jurnal Fathul Mu'in, yang berjudul “Anlisis Hukum Islam Terhadap Paraktik Upah Pekaman Jenazah”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian upah dalam pemakaman jenazah, akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong didalamnya. Para pengurus jenazah diperbolehkan mengambil dana atau upah yang diberikan pihak keluarga mayit sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memaksakan dan tidak pula memberikan pihak keluarga dengan mematok harga dengan jumlah tertentu, terlebih diluar jangkauan masyarakat. Pengurus jenazah haruslah iklas dalam melaksanakan tugasnya tanpa pamrih. Selanjutnya, apabila masyarakat tidak dapat memberikan upah, maka yang mengurus jenazah tetap harus membantau karena

---

<sup>10</sup>Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Berkeadilan, *Jurnal*, Vol VI No 2, (Agustus 2014), 105.

pengurusan jenazah merupakan kewajiban umat Islam setempat.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal Rachmad Firmansyah, yang berjudul “system upah minimum kabupaten dalam perspektif hukum islam (studi kasus upah minimum kabupaten sidoarjo)”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa islam tidak mengizinkan upah dibawah tingkat minimum berdasarkan kebutuhan dasar kelompok pekerja atau membiarkan kenaikan upah mereka melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan kontribusinya terhadap produksi. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usanya agar tetap eksis, sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Isla berusaha menciptakan keseimbangan yang adil antara keduanya, baik dalam hal remunerasi maupun perlindungan kepentingan pekerja dan pengusaha. Ada tiga parameter dalam islam sebagai dasar dalam menentukan system pengupahan yang sesuai syariah, yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan. Negara memiliki peran penting dalam memberikan perhatian kepada pekerja dalam memperoleh upah yang cukup untuk menopang tingkat kehidupan yang layak dan tidak memperbolehkan upah dibawah tingkat minimum.<sup>12</sup>

Kelima, jurnal Murtadho Ridwan, yang berjudul “Standar Upah Pekerja Menurut System Ekonomi Islam”. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa penentuan upah dalam system ekonomi modern adalah hukum permintaan dan penawarn buruh seperti yang dijelaskan oleh hukum permintaan. Sedangkan dala system ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan pekerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yang

---

<sup>11</sup> Fathul Mu'in, Anlisis Hukum Islam Terhadap Paraktik Upah Pekaman Jenazah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 2, 2020, 41-55.

<sup>12</sup> Rachmad Firmansyah, System Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Of Sharia Economics Theory And Applied*, Vol 4 No 6, 2017, 434.

telah diterangkan, yaitu meliputi sandang, pangan, papan, bagi pekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan pekerja yang bekerja di pemerintahan, disamping mendapat upah yang mencukupi keperluan hidup, mereka juga dapat fasilitas dan tunjangan yang lain seperti yang dijelaskan yusuf al-qordhawi. Dan jika upah seseorang yang bekerja di perusahaan atau industry tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengkategorikan pekerja tersebut termasuk diantara asnaf yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

Keenam, jurnal Budi Solihin, yang berjudul “pandangan islam tentang penetapan upah minimum regional (UMR)”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penetapan upah minimum regional (UMR) yang diterapkan oleh pemerintah sebetulnya sudah ada pada zaman pemikir klasik, namun pada hari ini UMR tersebut banyak yang lebih menguntungkan perusahaan, dan pemerintah cenderung pro perusahaan, sehingga banyak buruh yang demo menuntut haknya.

Jika antara pribadi individu buruh/pekerja, perusahaan/majikan, dan pemerintah menyadari nilai-nilai Islam seperti keadilan dan keimanan terhadap Allah SWT, tentu tidak akan merasa terdzalimi karena semua tahu tanggung jawab masing-masing. Sehingga ketika menetapkan UMR maka akan memperhatikan kebutuhan minimum pokok pegawai itu berapa dan tidak melebihi batas maksimum sehingga dapat melindungi pihak perusahaan/majikan juga.<sup>14</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan jurnal pada kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pengupahan, meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang

---

<sup>13</sup> Murtadho ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut System Ekonomi Islam, *jurnal ekonomi syariah*, vol 1 no 2, (desember 213) 241-257.

<sup>14</sup> Budi Solihin, Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR). *Jurnal Ilmu-Ilu Agama*, Vol 1 No 1, (Desember 2018), 19-31.

diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas penentuan pengupahan petugas pantai sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Selain itu, skripsi dan jurnal yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Upah Petugas Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Penentuan Upah Petugas Pantai Yang Ada di Kabupaten Pesisir Barat. Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui

---

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55.



media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum islam.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan wawancara ke objek penelitian yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan para petugas pantai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip

---

<sup>16</sup>*Ibid.* 56.

(data dokumentasi) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Sumber Hukum Primer Sumber hukum primer yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara yang langsung yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
2. Sumber Hukum sekunder  
Sumber hukum sekunder yaitu penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan upah mengupah yaitubuku fiqh islam lengkap, fiqh mumalah, dan buku hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan upah.
3. Sumber Hukum Tersier .  
Sumber hukum tersier yaitu penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini baik primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawaban berdasarkan prinsip ilmiah.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dankemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.<sup>17</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek peneltian, adapun populasi

---

<sup>17</sup>Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 6 orang petugas pantai dan 4 orang dari pihak dinas pariwisata. Karena populasi penelitian ini terbatas, maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian populasi

#### **4. Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>18</sup> Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang yang dari pihak pekerja dan menerima upah maupun dari pihak memberikan upah yaitu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

#### **5. Pengolahan Data**

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>19</sup> Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang penentuan upah petugas pantai menurut perspektif Hukum Islam.

Sedangkan Metode berfikir yang digunakan adalah induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif juga digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Sedangkan Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>19</sup>Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 36.



## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teori tentang upah (*ujrah*) dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, macam dan bentuknya, dasar-dasar dalam penetapannya, serta pembayaran dan berakhirnya *ujrah* upah tersebut.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang berjudul Upah Petugas Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) yang meliputi: gambaran umum Dinas Pariwisata pesisir Barat, dasar hukum penentuan upah petugas pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, dan praktik penentuan upah petugas pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

Bab keempat merupakan analisa upah petugas pantai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Petugas Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori *ujrah* (upah) secara umum.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam hal upah petugas pantai di Kabupaten Pesisir Barat.

## BAB II TENTANG UPAH DALAM ISLAM

### A. Pengertian dan Dasar Hukumnya

#### 1. Definisi *Ujrah*

*Ujrah* dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijarah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi *ijarah* berarti *bay'al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.<sup>1</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan boleh disewakan adalah manfaatnya. Dalam kamus hukum, *ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>2</sup>

*Ijarah* merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. *Al-ijarah* merupakan asal kata dari *al ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-I'wadh* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. *Ijarah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

*Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shidisy. Sedangkan menurut pengertian syara', *al-ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*.

Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 277.

<sup>2</sup> *Ibid*, 278

maupun jasa. Sedangkan *ujrah* adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.<sup>3</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kekuatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Ulama hanafiah berpendapat bahwa *Ujrah* adalah suatu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>4</sup> Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *ujrah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa, selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu *`aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk *`aqad* sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

Ulama *Hanabillah* berpendapat bahwa *ujrah* adalah suatu *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 134.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.<sup>5</sup>

*Ujrah* yaitu upah atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>6</sup> Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan, dan yang kedua upah yang sepadan.<sup>7</sup>

Istilah *ujrah* selain *ijarah*, ada juga *jialah/jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, akan tetapi upah dalam *jialah/jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah/jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.<sup>8</sup>

*jialah/jualah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan spesifik kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.<sup>9</sup>

Pihak yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan upah disebut dengan *khubara'u*.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti upah-mengupah

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslie, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 1308.

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

<sup>8</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

<sup>9</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 535.

<sup>10</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.



adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis Nabi.

## 2. Dasar Hukum Ujrah

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik *salaf* maupun *khlaf*, menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah (ujrah)*. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233)

2. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُّوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Ath-Thalaq: 6)

## 3. QS Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَعْرَجُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْرَجْتُ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".*

## 4. As-Sunnah; HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

Artinya : *Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.*<sup>11</sup>

Makna hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah diatas adalah upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada mereka.

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhariy, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam :

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاحْطَى الْحِجَامَ أَجْرَ

Artinya : *Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasalam pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. (HR. Ibnu Majah no. 2164).*<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al- Baihaqi, *Sunan Kubrah*, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198.

<sup>12</sup> Shahih Ibnu Majah No. 2164, Mukhtashor Sama'I no. 309. 189.

## 5. Ijma'

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.<sup>13</sup>

## B. Rukun dan Syaratnya

### a. Rukun *Ujrah*

suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi rukun:

1. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.<sup>14</sup>
6. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
7. Wujud upah harus jelas
8. Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna, maka suatu perjanjian tidak sah. Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

1. Aqid/pelaku akad ( *al-mu'jir* dan *al-musta'jir* )

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12.

yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

2. *Ma'qud alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Barang tersebut dapat disewakan
  - b. Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
  - c. Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan)
3. Barang yang diakadkan  
Terdapat adanya barang yang akan diakadkan
4. *Sighah* (ijab-qabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

b. Syarat-syarat *ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

1. *ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>15</sup> Konkrit atau dengan

---

<sup>15</sup> Ghufraan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.



menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).

3. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan. Diisyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak baik sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>16</sup>
4. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>17</sup> Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
5. Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>18</sup>

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk dari hak seseorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

---

<sup>16</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>17</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186-187.

<sup>18</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh Alal Madzhab Ibil Arba'ah)*, Juz IV, (Semarang: CV, As-Syifa', 1994), 180.

- a. Berupa harta tetap yang diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>19</sup>

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.<sup>20</sup>

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal mengupah adalah para musta'jir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaiknya-baiknya, kegagalan moral baik dari pihak musta'jir maupun muajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.<sup>21</sup>

### C. Macam-macam dan Jenisnya

#### a. Macam-macamnya

1. upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak
2. upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akadnya telah menyebutkan jasa manfaat kerjanya.

#### b. Jenis-jenisnya

1. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129.

<sup>20</sup> Jalaludin Abdurahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jami'us Sagir, Jus II*, (Darul Fikr, tt), 186.

<sup>21</sup> *Ibid*, 187.

mengajarkan Al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:

a. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran tersebut.

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan fasid (tidak sah).<sup>22</sup>

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT, Al-Ma'rif, 1997), 30.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133.

#### d. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, ataupun penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>24</sup>

#### e. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.<sup>23</sup> Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul<sup>25</sup>:<sup>24</sup> Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu.

#### f. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

<sup>25</sup> Shahih bukhari, *CD hadits*, no. 2117.

وَتَشَاوِرِ فَلَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-Baqarah: 233)

#### 1. Upah yang tidak diperbolehkan

##### a. Upah atas praktek ibadah

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan,



jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.

b. Upah perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>26</sup>

c. Akad yang melanggar syariat Islam

d. Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat

e. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain

f. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

#### **D. Dasar-Dasar Pertimbangan Dalam Penetapannya**

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyār* yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*). Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih mu'amalah transaksi antara barang dengan uang disebut *ṣaman* (harga/ *price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/*wage*). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang. Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang

---

<sup>26</sup> Hamzah Yaq'qub, *Kode Etik Dagang Menuru Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut.<sup>27</sup> Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi *duniawi* (materi atau kebendaan) dan *ukhrawi*. Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlāk*). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah *keadilan ilahi*, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Manusia sebagai *abdullah* dan *khalifatullah* di bumi harus memelihara hukum dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat secara adil dan baik.<sup>28</sup> Nilai-nilai keadilan itu harus diterapkan secara menyeluruh dalam bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Keadilan menggambarkan keseimbangan, perbandingan, keharmonisan sebagaimana ia menggambarkan keadilan dari segi undang-undang dan pemberian hak kepada yang berhak. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai mempersamakan antara yang satu dengan lainnya (*al-musāwāh*) dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, atau keseimbangan

---

<sup>27</sup> Waliam Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), 267-273.

<sup>28</sup> *Ibid.* 267-273

antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Abbas al-Akkad berkata bahwa persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman (*laa tazlimuna walaa tuzlamuna*) . Oleh sebab itu, keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya. Dalam pengertian lain, keadilan adalah bermaksud meletakkan suatu benda atau perkara di tempat yang sebenarnya.<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut harus dipelajari keterkaitan antara keadilan dengan kesamaan Membedakan dua hal yang sama dengan tanpa alasan yang logis adalah suatu kezaliman, demikian pula sebaliknya tidak adila pabilamenyamakandua hal yang berbeda untuk memenuhi prinsip persamaan.Namun jika asas perbedaan adalah prioritas dan fasilitas yang dikhususkan bagi suatu kaum atau perorangan atau keluarga yang berakibat pada suap, kolusi, nepotisme dan sebagainya, maka yang seperti inilah yang dikategorikan eksploitasi dan kezaliman yang dilarang. Perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan ialah Armansyah Waliam yang berlandaskan perbedaan ilmu pengetahuan, pekerjaan dan kebajikan. Jadi arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajiban, dan juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut. Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki seseorang wajib

---

<sup>29</sup> *Ibid.* 267-273

diperlakukan secara adil.<sup>30</sup> Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil, tanpa diikuti dengan rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Dalam pengertian lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya (Qardhawi, 1996:736). Dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip moralitas, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian:

a. Proporsional

Dalam Al-Qur'ān terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT dalam QS. Albaqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا غَافِلِينَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya. Bagi seseorang, pahala (dari kebajikan) yang ia buat dan baginya pula dosa yang ia buat (Al Baqarah (2) 286).

Secara hakiki ayat ini menjelaskan tentang balasan yang akan diterima seorang hamba atas segala perbuatannya selama di dunia. Akan tetapi nilai keadilan yang diembannya

---

Waliam Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), 267-273.

tersebut bisa diterapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.<sup>31</sup> Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinyaterhadapproduksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan. Prinsip keadilan dalam upah ini diterjemahkan oleh pakar manajemen barat menjadi prinsip *equal pay of equal job*, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ini mengandung makna bahwa apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah yang akan mereka terima juga harus sama. Menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kezaliman.<sup>32</sup>

Jadi penganiayaan yang terkait upah terhadap pekerja adalah tidak dibayar secara adil atau tidak sesuai dengan bagian yang sah dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan terhadap pengusaha adalah menuntut dan memaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan yang dimilikinya.

b. Transparan dan Jelas

Akad *ijārah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya *akad* (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya

---

<sup>31</sup> Waliam Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam..... Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), 267-273.

<sup>32</sup> *Ibid*, 267-273.



sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain. Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan tidak hanya dalam urusan upah saja, tetapi dalam urusan lainnya seperti perekrutan pekerja, promosi jabatan, keputusan-Armansyah Waliam keputusan lain dimana manajer harus menilai kinerja seorang pekerja terhadap pekerja lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan(Muhammad, 2004:137). Sebagaimana firman Allah SWT pada QS An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat (An Nisa (4) 58).*

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi( Hafidhuiddin, 2008: 33). Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna (At Thulabbi, 247). Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan

kedua belah pihak. Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara *syar'i* seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (*akad*). Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada protes, dan apabila keduanya telah mematuhi syarat akad dan hukum *syara'*, maka sudah pasti segala perselisihan dan ketidakpuasan hati tidak akan timbul. Jika terjadi perselisihan sekalipun kedua pihak wajib berpedoman kepada akad yang telah dibuat dan Hukum-hukum Allah berkenaan dengan pengupahan, bukan dengan mengadakan protes, rapat umum, demonstrasi, mogok kerja dan sebagainya. Dengan cara ini hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis dan terjaga serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. karena pematuhan atas akad masing-masing.<sup>33</sup>

## **E. Pembayaran dan Berakhirnya**

### **a. Pembayaran *Ujrah***

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau *ujrah* :

Ulama hanafiah berpendapat bahwa *Ujrah* adalah suatu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>34</sup> Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *ujrah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan dan

---

<sup>33</sup> Waliam Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. ...., Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), 267-273.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa, selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu *'aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk *'aqad* sewa-menyewa pada benda benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

Ulama *Hanabillah* berpendapat bahwa *ujrah* adalah suatu *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.<sup>35</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

Jika *ujroh* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan panangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika muajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslie, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 1308.

*musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِيفَ غُرْقَاهُ

Artinya: *berikanlah Upah Sebelum Keringat Pekerja Itu Kering* (HR. Ibnu Majah).<sup>36</sup>

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diujrahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>37</sup>

b . Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :

- 1 Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>38</sup>
- 2 Pembatalan akad.
- 3 Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ujroh*. Hal tersebut dikarenakan *ujroh* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.
- 4 Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqâlah* seperti pada akad jual beli.

<sup>36</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al- Baihaqi, *Sunan Kubrah*, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198.

<sup>37</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 121.

<sup>38</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 122.

Di antara penyebabnya misalnya terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.<sup>39</sup>

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, 284.



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku :

- Abdurahman Jalaludin Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jami'us Sagir, Jus II*, Darul Fikr, tt.
- Ahmad, Abi Bakar Bin Husain Bin Al- Baihaqi, *Sunan Qubrah*, Juz VI, Bairut:Darul Kitab, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh Alal Madzhab Ibil Arba'ah)*, Juz IV, Semarang: CV, As-Syifa', 1994.
- Asikin, Zinal, *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Danim sudarwan, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Ghazaly, Abdul, Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1.
- Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia* Bandung: Pt Citra Adityabakti, 2006.
- Ismail Yusanto Muhammad dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mas'adi, Ghufrani, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* 13, Bandung: PT Alma'rif, 1987.

Sahrani, Sohari Dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shahih bukhari, *CD hadits*, no. 2117

Shahih Ibni Majah No. 2164, Mukhtashor Sama'I no. 309.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, Cv. 2017.

Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sunyoto Danang, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Wardi, Muslie Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

#### **Sumber Online:**

Keberadaan Petugas Penjaga Pantai Kabupaten Pesisir Barat (Online), Tersedia di: [www.lampost.com](http://www.lampost.com) (18 Oktober 2020 Pukul 19.45 WIB).

Pengertian Perspektif (Online), Tersedia di :[www.antotenanan.com](http://www.antotenanan.com) (05 Januari 2020 Pukul 17.00 Wib.

Peran Penting Lifeguard (Online), Tersedia di: [www.realitapost.com](http://www.realitapost.com) (18 Oktober 2020 Pukul 19.40 Wib)..

#### **Jurnal:**

Armansyah, Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017).

- Budi Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)". *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Vol 1 No 1, (Desember 2018), 19-31.
- Fathul Mu'in, "Anlisis Hukum Islam Terhadap Paraktik Upah Pekaman Jenazah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 2, 2020, 41-55.
- Murtadho ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut System Ekonomi Islam", *jurnal ekonomi syariah*, vol 1 no 2, (desember 213) 241-257.
- Rachmad Firmansyah, "System Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)", *Jurnal Of Sharia Economics Theory And Applied*, Vol 4 No 6, 2017, 434.
- Siswadi, "Pemberian Yang Benar Dalam Islam Upay Pemerataan Ekonomi Umat Dan Berkeadilan", *Jurnal*, Vol Iv No 2, (Agustus 2014), 105.
- Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Islam", *Jurnal*, Vol 10 No 2, (Dseember 2010), 309-324.

